

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN ACEH UTARA

Muhammad Rizky Al-Kautsar
NPP. 32.0035

Asdaf Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: rzkykautsar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Sampara Lukman, MA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): North Aceh Regency continues to face the challenge of extreme poverty despite its abundant natural resources. In 2024, as many as 18,650 individuals were recorded as living in extreme poverty, indicating the need for a collaborative governance approach among stakeholders. **Purpose:** To analyze the implementation of collaborative governance in addressing extreme poverty in North Aceh Regency. **Method:** This study employs a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants consisted of 11 individuals, including the Regional Secretary, Head of the Social Affairs Office, Head of the Social Assistance Division, Secretary of the Regional Development Planning Agency (Bappeda), Head of the Public Works Office, Head of Baitul Mal, a Bank Aceh employee, and four individuals from the extreme poor community. The analysis adopts the Collaborative Governance model by Ansell & Gash (2007), which includes four key dimensions: starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process. Data analysis followed the stages of reduction, display, and conclusion drawing.. **Results/Findings:** The implementation of collaborative governance in addressing extreme poverty in North Aceh Regency has not been fully effective. The initial condition is marked by resource disparities and low participation incentives. The institutional design has established a collaboration forum, but the cooperation rules remain inconsistent and lack transparency. Facilitative leadership is in place but still requires capacity strengthening and consistency among actors. In the collaborative process, dialogue and trust are beginning to develop, although shared commitment and understanding remain weak. Supporting factors include the role of Baitul Mal, community participation, and regulatory support; while the obstacles are weak coordination, limited budget, and inaccurate poverty data. **Conclusion:** Collaborative governance in tackling extreme poverty in North Aceh Regency has not yet been fully optimized. Although there have been collaborative efforts among local government, the private sector, and the community, its implementation still faces structural and institutional challenges that hinder effective cooperation. Strengthening cross-sectoral coordination, enhancing institutional capacity, and improving more inclusive and transparent collaborative mechanisms are necessary. **Keywords:** Extreme Poverty, Collaborative Governance, Local Government, Poverty Reduction Coordination Team

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan kemiskinan ekstrem meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam. Pada 2024, sebanyak 18.650 jiwa tercatat sebagai penduduk miskin ekstrem, mencerminkan perlunya pendekatan tata kelola kolaboratif antar pemangku kepentingan. **Tujuan:** Menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 11 orang, yaitu Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Banjamsos, Sekretaris Bappeda, Kepala PUPR, Kepala Baitul Mal, pegawai Bank Aceh, dan empat masyarakat miskin. Analisis mengacu pada model *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum sepenuhnya efektif. Kondisi awal ditandai ketimpangan sumber daya dan rendahnya insentif partisipasi. Desain kelembagaan sudah membentuk forum kolaborasi, namun aturan kerja sama belum konsisten dan transparan. Kepemimpinan fasilitatif berjalan, tapi masih perlu penguatan kapasitas dan konsistensi antar aktor. Dalam proses kolaboratif, dialog dan kepercayaan mulai tumbuh, meski komitmen dan pemahaman bersama masih lemah. Faktor pendukungnya antara lain peran Baitul Mal, partisipasi masyarakat, dan regulasi; sedangkan hambatannya adalah lemahnya koordinasi, keterbatasan anggaran, dan data kemiskinan yang belum akurat. **Kesimpulan:** *Collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat upaya kolaboratif antar pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, penerapannya masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengurangi efektivitas kerja sama. Diperlukan penguatan dalam aspek koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan mekanisme kolaboratif yang lebih inklusif dan transparan.

Kata kunci: Kemiskinan ekstrem, Collaborative Governance, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2023, sebanyak 25,22 juta jiwa (9,03%) hidup di bawah garis kemiskinan (Kementerian Keuangan, 2023). Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan mewajibkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010.

Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Berdasarkan data BPS, Aceh menempati posisi ke-10 sebagai provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2024:

Tabel 1.**Persentase Provinsi dengan Penduduk Termiskin di Indonesia Tahun 2024**

No	Provinsi	Persentase Kemiskinan
1	Papua Pegunungan	32,97%
2	Papua Tengah	29,76%
3	Papua Barat	21,66%
4	Nusa Tenggara Timur	19,48%
5	Papua Barat Daya	18,13%
6	Papua Selatan	17,44%
7	Papua	17,26%
8	Maluku	16,05%
9	Gorontalo	14,57%
10	Aceh	14,23%

Sumber: BPS Nasional, diolah Peneliti (2024)

Di antara kabupaten/kota di Aceh, Aceh Utara mencatatkan peningkatan angka kemiskinan ekstrem, dari 16.620 jiwa pada 2021 menjadi 18.650 jiwa pada 2022:

Tabel 2.**Kemiskinan Ekstrem di Aceh (2021–2022)**

Kabupaten/Kota	2021	2022
Pidie	19.710	22.150
Aceh Utara	16.620	18.650
Bener Meriah	15.220	10.570
Aceh Timur	15.110	12.760
Aceh Barat	12.810	4.540
Pidie Jaya	11.800	7.210
Aceh Besar	11.790	11.950
Aceh Tengah	10.740	10.200

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2022), diolah Peneliti (2024)

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai pengeluaran di bawah US\$2,15 per hari (setara ±Rp349.000 per bulan per kapita). Sementara garis kemiskinan Aceh Utara pada 2024 ditetapkan sebesar Rp473.719 per kapita per bulan. Berdasarkan data, pada 2024 Aceh Utara memiliki:

- Jumlah penduduk miskin: 104.490 jiwa
- Persentase: 16,11%
- Indeks Kedalaman: 2,78%
- Indeks Keparahan: 0,70%
- Jumlah penduduk miskin ekstrem (2023): 18.650 jiwa (0,52%)

Tabel 3 .**Penduduk Miskin Aceh Utara (2022–2024)**

Tahun	Total Penduduk	Penduduk Miskin	Persentase (%)
2022	610.428	107.020	17,86%

2023	617.717	106.770	16,64%
2024	624.528	104.490	16,11%

Sumber: BPS Provinsi Aceh (2023), diolah Peneliti (2024)

Penurunan persentase kemiskinan belum mampu menurunkan angka secara signifikan, karena masih berada di atas rata-rata provinsi. Kompleksitas kemiskinan Aceh Utara diperparah oleh ketergantungan terhadap sektor migas, penurunan aktivitas industri strategis nasional, dan dampak konflik masa lalu. Program penanggulangan seperti *Kotaku*, zakat produktif dari Baitul Mal, pembangunan rumah dhuafa, serta kolaborasi lintas pendanaan (APBN, APBD, CSR, Dana Desa) telah diterapkan, namun belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan anggaran.

Seiring dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TKPK terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan sumber daya, mencegah duplikasi program, dan memperkuat efektivitas kebijakan (Susha dan Gil-Garcia, 2019). Sejalan dengan itu, Velby dan Yuadi (2023) dalam kajian meta-analitiknya menekankan bahwa *collaborative governance* bukan hanya kerangka kerja administratif, tetapi merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui sinergi antar aktor lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah tentang bagaimana *collaborative governance* diimplementasikan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara meskipun berbagai program dan kebijakan telah dijalankan secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep ini di daerah lain, namun belum ada kajian yang secara spesifik meneliti bagaimana bentuk kolaborasi, faktor pendukung, hambatan, dan strategi penyelesaiannya di Aceh Utara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penerapan *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di wilayah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu dengan fokus pada dinamika *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara menggunakan pendekatan teori Ansell & Gash (2007), yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam berbagai konteks penanggulangan kemiskinan dan penanganan masalah sosial lainnya. Handayani et al. (2023) menemukan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* di Kabupaten Bangkalan tidak berjalan efektif, terutama pada aspek kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, akibat tidak adanya persepsi yang seragam mengenai masyarakat miskin. Sementara itu, Ramadhani et al. (2024) menyoroti efektivitas kolaborasi di Desa Ngemplakrejo, yang menunjukkan hasil positif setelah dikeluarkannya

SK Bupati yang mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan dan perangkat desa. Lawelai dan Nurmandi (2023) dalam kajian pustakanya menegaskan bahwa *collaborative governance* yang disertai komunikasi dan koordinasi yang efektif dapat menjadi solusi inklusif untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, Harianja dan Jamaruddin (2024) mengangkat studi di Kabupaten Indragiri Hulu dan menekankan pentingnya dukungan kelembagaan dalam tata kelola kolaboratif. Adapun Suroso dan Marzuki (2024) menerapkan pendekatan serupa pada konteks pascabencana tanah longsor, menekankan bahwa sinergi antar aktor menjadi kunci keberhasilan penanganan masalah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengkaji secara spesifik penerapan *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara, sebuah daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan historis yang unik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat umum atau dilakukan di daerah lain, studi ini menyoroti dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta lembaga keagamaan seperti Baitul Mal, dalam konteks lokal Aceh Utara. Kebaruan juga terletak pada pendekatan analisis yang menggunakan model Ansell & Gash secara komprehensif, mencakup kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, tetapi juga mengkaji secara mendalam strategi konkret yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang relevan terhadap pengembangan konsep *collaborative governance* dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah yang memiliki otonomi khusus dan dinamika pasca-konflik seperti Aceh.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Fokus utama mencakup bentuk kolaborasi antar aktor, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan dalam proses kolaboratif tersebut. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *collaborative governance* dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial secara kontekstual dan kompleks, serta menekankan pada makna yang dibangun dari pengalaman para aktor yang terlibat (Douglas, 2022). Dalam penelitian ini, model *collaborative governance* yang digunakan mengacu pada teori Ansell & Gash (2007), yang terdiri dari empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana berbagai aktor bekerja sama dalam menciptakan nilai publik, sebagaimana dikemukakan oleh Bryson, Crosby, dan Bloomberg (2014), bahwa public

value governance menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi isu-isu kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara birokratis atau pasar semata.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan delapan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan tersebut terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Baitul Mal, Pegawai Bank Aceh, serta perwakilan masyarakat miskin. Mereka dipilih karena memiliki posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem, sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan kaya konteks.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman informan terhadap bentuk kolaborasi, tantangan, dan strategi pelaksanaan. Observasi digunakan untuk mencatat dinamika yang terjadi di lapangan, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap kebijakan, laporan kegiatan, dan data statistik terkait. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yang melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (2014). Serta diperdalam melalui teknik kategorisasi dan pengembangan tema yang mendalam sebagaimana dijelaskan oleh Bradley, Curry, dan Devers (2007), untuk mengembangkan pemahaman yang sistematis terhadap pola-pola dan temuan yang muncul dari data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kemiskinan Esktrm di Kabupaten Aceh Utara.

Mengatasi kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Di Kabupaten Aceh Utara, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang melibatkan berbagai unsur tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Dr. Fauzan, S.STP, MPA, pada 6 Januari 2025, collaborative governance merupakan strategi penting yang telah diterapkan melalui pembentukan SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Setiap OPD memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam kolaborasi ini. Pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas lintas sektor, meskipun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi, perbedaan visi, dan keterbatasan anggaran.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Inong Safriani, S.STP, S.Sos, M.Si, pada 9 Januari 2025 menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi dasar utama dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. BAPPEDA berperan dalam menyusun strategi pembangunan yang menyeluruh dan menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk mencapai visi bersama.

Dalam konteks kebijakan, BAPPEDA Kabupaten Aceh Utara menerapkan enam strategi utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem:

- a. Mengurangi Beban Pengeluaran
- b. Meningkatkan Pendapatan
- c. Meningkatkan Kualitas SDM
- d. Mengurangi Kantong-kantong Kemiskinan

- e. Menjaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok
- f. Menanggulangi dan Mengurangi Dampak Bencana

Setiap strategi diimplementasikan melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh OPD terkait, seperti Baitul Mal, DINSOS, DINKES, DISNAKERTRANS, PERTANIAN, DISKOPERINDAG, PUPR, dan lainnya.

Selain itu, sektor swasta juga memiliki peran penting melalui program CSR dan kemitraan dengan pemerintah, yang berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan pelatihan keterampilan. Kolaborasi ini diharapkan berjalan sejalan dan saling menguntungkan, guna menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Model kemitraan tiga pihak sebagaimana digambarkan oleh TNP2K (2019) menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Masing-masing pihak memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007), yang mencakup empat faktor penting dalam kolaborasi, dan mendeskripsikan hasil implementasinya dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara.

1. Kondisi Awal

Sebelum membahas penerapan collaborative governance, penting untuk memahami kondisi awal yang melatarbelakangi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Daerah ini termasuk wilayah dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi di Provinsi Aceh. Persoalan kemiskinan di Aceh Utara bersifat multidimensional, tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan, tetapi juga terkait erat dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta fasilitas ekonomi yang memadai. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan minimnya peluang kerja, diperburuk oleh kondisi infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan teknologi.

Kondisi geografis yang luas dan tersebar menambah kompleksitas dalam penyaluran bantuan secara merata. Hal ini menciptakan ketimpangan antar wilayah, khususnya antara daerah pusat dan gampong-gampong terpencil. Dampak konflik masa lalu juga masih membekas, terutama pada rendahnya tingkat kepercayaan sosial dan lemahnya kapasitas kelembagaan lokal. Akumulasi tantangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tradisional yang bersifat top-down dan sektoral tidak lagi memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan adaptif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan.

Upaya kolaboratif yang dijalankan pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah, sektor swasta, lembaga sosial keagamaan, hingga masyarakat sipil. Salah satu aspek penting dalam pendekatan kolaboratif ini adalah keterbukaan informasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan transparansi data melalui rapat koordinasi rutin dan aplikasi seperti SIKS-Dataku. Melalui aplikasi ini, informasi terkait penerima bantuan sosial seperti BPNT dan PKH dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk media dan masyarakat.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Siti Rahmah, menambahkan bahwa sistem kolaborasi ini berjalan cukup baik karena perangkat daerah telah memiliki

tugas dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun demikian, tantangan dalam penyebaran informasi di tingkat masyarakat masih terjadi. Banyak masyarakat miskin belum memahami program bantuan yang tersedia maupun mekanisme untuk mengaksesnya. Abrar Maulida dari Bank Aceh menyampaikan bahwa kesenjangan informasi masih terlihat jelas, khususnya di wilayah pelosok. Sosialisasi sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial, namun tetap belum menjangkau seluruh kalangan.

Dari sisi penerima bantuan, masyarakat seperti Ibu Nurhayati dan Bapak Idrus menyampaikan bahwa mereka masih bingung harus mencari informasi ke mana, dan berharap ada pendampingan langsung dari pihak terkait. Informasi yang hanya disampaikan dari mulut ke mulut sering kali menimbulkan miskomunikasi. Peneliti juga mencatat minimnya sarana informasi di tingkat desa seperti papan pengumuman dan akses internet yang terbatas, serta kurangnya kegiatan sosialisasi langsung sebelum penyaluran bantuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi telah diupayakan, belum sepenuhnya menjangkau dan dipahami oleh masyarakat akar rumput.

Selain keterbukaan informasi, keberhasilan kolaborasi juga bergantung pada insentif untuk partisipasi dari berbagai pihak. Pemerintah menunjukkan komitmen melalui penerbitan SK pelaksanaan kerja sama antarlembaga. Komitmen ini memperjelas peran masing-masing instansi dalam kegiatan pengentasan kemiskinan. Dalam praktiknya, keterlibatan instansi terlihat dalam kehadiran mereka pada rapat-rapat koordinasi serta pelaksanaan program-program sosial di lapangan.

Peran sektor swasta juga penting. Bank Aceh, misalnya, memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan sosial seperti penyediaan sarana umum, bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Bagi masyarakat, bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya. Seperti disampaikan oleh Ibu Nurhayati, bantuan dari pemerintah dan Bank Aceh sangat membantu ketika mereka mengalami musibah banjir dan belum mampu bekerja. Bentuk insentif ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan desa, pelatihan keterampilan, dan forum musyawarah.

Observasi langsung peneliti memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat meningkat ketika mereka merasa memperoleh manfaat langsung. Dalam pelatihan menjahit di Tanah Pasir, terlihat antusiasme tinggi dari ibu-ibu rumah tangga. Mereka tidak hanya hadir, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertanya. Di sisi lain, dokumentasi kegiatan CSR oleh lembaga swasta juga menunjukkan transparansi dan keberlanjutan dalam pemberian bantuan. Di Kecamatan Matangkuli, distribusi bantuan dilakukan secara tertib dan masyarakat memberikan respon positif terhadap bantuan yang mereka terima.

Melalui insentif kelembagaan berupa SK, bantuan sosial oleh sektor swasta, serta pelatihan keterampilan yang membuka peluang pemberdayaan ekonomi, kolaborasi pengentasan kemiskinan di Aceh Utara menunjukkan perkembangan yang positif. Insentif-insentif ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Desain kelembagaan

Desain kelembagaan dalam collaborative governance memegang peran penting dalam menciptakan struktur yang mampu mendukung koordinasi dan kerja sama antara berbagai aktor dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara. Konsep ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash, menekankan pentingnya

partisipasi aktif dari sektor publik, masyarakat, dan sektor swasta guna mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan proses dinamis yang menjamin keberlangsungan interaksi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi aspek yang sangat esensial dalam proses penanggulangan kemiskinan. Komitmen kuat dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dijalankan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sartika (2018), keberhasilan model collaborative governance sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pemangku kepentingan untuk berbagi peran secara adil dan menjalankan tanggung jawab sesuai kapasitas masing-masing dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini mendorong terbentuknya kerangka kerja kolaboratif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga fungsional dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Bapak Iskandar, S.STP, M.S.P, diketahui bahwa bentuk komitmen ini terwujud dalam dokumen resmi seperti surat keputusan atau pernyataan kerja sama. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ibu Siti Rahmah, menambahkan bahwa indikator keterlibatan ini juga tercermin dalam kehadiran pada rapat koordinasi serta kontribusi aktif dalam pelaksanaan program.

Sektor swasta juga menunjukkan keterlibatan yang signifikan, contohnya Bank Aceh yang tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi turut andil dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Mereka menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berbasis pada data dari Dinas Sosial, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Dari sisi masyarakat, partisipasi tampak dari keikutsertaan dalam forum-forum diskusi di tingkat desa serta dalam kegiatan evaluasi program. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati, seorang penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan bahwa program benar-benar menysasar kebutuhan mereka.

Temuan observasional mendukung adanya partisipasi ini, antara lain melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin yang melibatkan dinas terkait dan pihak swasta, pembentukan tim pelaksana kolaborasi melalui surat keputusan, serta kegiatan CSR yang dilaksanakan bersama antara Bank Aceh, relawan, dan instansi pemerintah. Keberadaan struktur kolaboratif ini memperkuat kohesi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Selain partisipasi, keberadaan aturan kerja sama yang jelas juga merupakan elemen penting dalam evaluasi kebijakan kolaboratif. Regulasi yang tertulis dan terstruktur memberikan kepastian hukum serta arah yang jelas dalam pelaksanaan program. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Utara telah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati serta Instruksi Bupati yang secara spesifik mengatur tentang percepatan penghapusan kemiskinan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sekretaris Bappeda dan Kepala Baitul Mal Aceh Utara yang menyebutkan keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen regulatif lain yang mendukung sinergi antar lembaga.

Hasil pengamatan peneliti turut membuktikan hal tersebut, di antaranya ditemukannya SK Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Bupati sebagai pedoman rencana aksi, serta SOP yang mengatur kerja sama antara Baitul Mal dan pihak eksternal. Aturan-aturan ini tidak hanya menjadi

pedoman administratif, tetapi juga menjadi dasar normatif yang memperkuat legitimasi kolaborasi serta memperjelas peran masing-masing pihak.

Transparansi juga menjadi aspek kunci yang tidak bisa diabaikan dalam proses kolaborasi. Kejelasan informasi memungkinkan pengawasan publik serta memastikan pertukaran informasi yang efisien antar aktor. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memanfaatkan sistem informasi seperti SIKS-Dataku milik Kementerian Sosial yang memberikan akses data kepada semua pihak terkait. Informasi terkait anggaran, tujuan program, serta hasil yang dicapai disampaikan secara terbuka, baik melalui situs resmi maupun forum-forum diskusi publik.

Bank Aceh, sebagai mitra dari pemerintah daerah, turut mengedepankan prinsip transparansi dalam proses penyaluran bantuan. Mereka menyediakan bukti transaksi kepada penerima, melakukan sosialisasi secara terbuka, serta memberikan akses terhadap informasi keuangan. Apresiasi terhadap keterbukaan ini juga disampaikan langsung oleh beberapa penerima manfaat, yang merasa lebih percaya dan memahami proses bantuan yang mereka terima.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik transparansi ini diterapkan secara konsisten, misalnya melalui publikasi agenda dan notulen rapat koordinasi, penyediaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, serta pelaporan yang dilakukan oleh pihak perbankan. Semua ini menunjukkan bahwa struktur kolaboratif yang dibangun telah memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan proses yang inklusif, terbuka, dan akuntabel.

Dengan demikian, desain kelembagaan dalam collaborative governance di Kabupaten Aceh Utara telah menunjukkan integrasi prinsip-prinsip partisipasi aktif, kejelasan aturan kerja sama, dan transparansi proses. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk fondasi kuat bagi pembangunan kolaboratif yang berkelanjutan. Pendekatan ini bukan hanya menciptakan efektivitas teknis, tetapi juga memperkuat kepercayaan antar pemangku kepentingan serta meningkatkan legitimasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif menjadi aspek penting dalam collaborative governance, yang tidak hanya dilihat dari sisi struktural, tetapi juga dari kemampuan dalam membangun komunikasi, memecahkan masalah, serta mendorong partisipasi aktif semua aktor. Di Kabupaten Aceh Utara, pendekatan kepemimpinan ini tercermin dalam upaya peningkatan kapasitas dan pengembangan inovasi untuk mengatasi kemiskinan.

Peningkatan kapasitas menjadi pilar utama dalam menjalankan kolaborasi yang efektif. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memandang penting kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama dalam mengimplementasikan inovasi baru. Pemerintah menekankan penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada ketiga sektor tersebut. Dalam pidatonya, Bupati Aceh Utara menekankan pentingnya inovasi dalam optimalisasi sumber daya, seperti pertanian organik dan pengembangan desa wisata, serta penguatan kehidupan sosial dan keagamaan. Di kesempatan lain, beliau juga menyoroti tiga inovasi penelitian utama yaitu kajian zona unggulan wilayah Utara-Timur, peningkatan nilai jual produk minyak atsiri, dan pengolahan kelor bebas Covid-19 dan stunting tanpa biaya.

Asisten I Sekretariat Daerah, Dr. Fauzan, menyampaikan bahwa pendekatan

kolaboratif antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pertukaran ide dan pengetahuan yang produktif. Kepala Dinas Sosial, Iskandar, menambahkan bahwa pemerintah juga dapat memberikan dukungan teknis dan finansial bagi inisiatif baru serta memfasilitasi forum-forum kolaboratif secara rutin guna memunculkan peluang baru dalam penanggulangan kemiskinan.

Bank Aceh Syariah turut berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program literasi keuangan. Abrar Maulida, pegawai Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, menjelaskan bahwa bank memberikan pelatihan mengelola dana bantuan dan memperkenalkan produk perbankan mikro kepada calon pelaku usaha kecil. Hal ini disampaikan pula oleh Ibu Nurhayati, warga Kecamatan Syamtalira Bayu, yang merasa terbantu setelah mengikuti pelatihan keuangan dan mulai berencana membuka usaha sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas tidak hanya melalui kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga literasi dan keterampilan yang diterima langsung oleh masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas diterapkan melalui berbagai program, seperti pelatihan literasi keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Aceh dan Dinas Sosial di Kecamatan Syamtalira Bayu, program pendampingan usaha mikro di Gampong Matangkuli yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM bersama universitas mitra, serta pemanfaatan media sosial pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi pelatihan dan program kewirausahaan. Semua ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat dalam mendorong masyarakat miskin menjadi pelaku ekonomi mandiri.

Kualitas kepemimpinan juga menjadi penentu keberhasilan kolaborasi. Pemimpin yang memiliki integritas, mampu berkomunikasi secara efektif, adaptif, dan solutif, sangat memengaruhi dinamika kerjasama antarpemangku kepentingan. Kepala Dinas Sosial, Iskandar, menjelaskan bahwa dalam setiap rapat koordinasi, ia selalu menyampaikan program Dinas Sosial dan kendala pelaksanaannya agar bisa dibahas bersama. Sekretaris Bappeda, Inong Safriani, menyatakan bahwa setiap instansi diberikan ruang untuk menyampaikan ide, solusi, maupun hambatan yang dihadapi dalam forum rutin.

Kepemimpinan kolaboratif juga terlihat pada peran Bank Aceh. Abrar Maulida menyatakan bahwa lembaganya menerapkan kepemimpinan partisipatif dan responsif dengan membuka ruang koordinasi bersama pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti yang disampaikan Ibu Nurhayati dari Kecamatan Syamtalira Bayu, bahwa keberadaan pemimpin yang datang langsung ke desa dan bersedia mendengarkan keluhan warga sangat membantu mereka. Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Idrus dari Kecamatan Matangkuli yang menilai bahwa pemimpin yang tegas, terbuka, dan adil akan lebih dipercaya oleh masyarakat, terutama ketika mereka hadir langsung dan menjelaskan program yang sedang dijalankan.

Observasi peneliti juga memperkuat pernyataan tersebut. Dalam rapat koordinasi di Aula Bappeda Aceh Utara, Kepala Dinas Sosial menunjukkan gaya kepemimpinan terbuka dengan mendorong dialog dan menyampaikan pembaruan program secara langsung. Di lapangan, peneliti menyaksikan perwakilan dinas melakukan monitoring bantuan sosial secara langsung di Kecamatan Matangkuli dan berdialog dengan masyarakat penerima. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan kehadiran administratif, tetapi juga kehadiran

sosial dan emosional pemimpin dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang aktif, terbuka, partisipatif, dan responsif sangat efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat sinergi antarinstansi. Kepemimpinan seperti ini memainkan peran sentral dalam keberhasilan pelaksanaan program kolaboratif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara merupakan implementasi nyata dari konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menekankan pentingnya penciptaan kesepakatan awal, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen terhadap proses.

Tahapan pertama dalam proses kolaborasi ini adalah penciptaan kesepakatan awal, yang dilakukan melalui berbagai pertemuan dan forum diskusi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Salah satu bentuk komunikasi yang dominan digunakan adalah dialog tatap muka, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi secara terbuka dan membangun pemahaman bersama. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Iskandar, menjelaskan bahwa pihaknya rutin mengadakan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan kemiskinan, menganalisis penyebabnya, dan merumuskan langkah konkret. Kegiatan ini dilaksanakan secara transparan dan mendorong komunikasi terbuka antara para aktor yang terlibat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Siti Rahmah, menyatakan bahwa kolaborasi mempermudah pihaknya dalam mendapatkan data, informasi, serta menemukan keluarga penerima manfaat.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Inong Safriani, menegaskan pentingnya pertemuan teratur untuk berbagi informasi antar instansi. Dalam rapat-rapat yang diadakan, dibahas berbagai hal seperti persiapan rapat koordinasi TKPK, sasaran kemiskinan ekstrem, serta tindak lanjut program percepatan penghapusan kemiskinan. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa rapat-rapat tersebut melibatkan berbagai pihak dan dilaksanakan secara aktif serta produktif. Bank Aceh turut berpartisipasi dalam bentuk program CSR yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial, pelatihan usaha, dan penyediaan layanan keuangan inklusif. Staf Bank Aceh, Abrar, menjelaskan bahwa CSR adalah bentuk kepedulian yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat. Namun demikian, masyarakat seperti Ibu Rita mengeluhkan bahwa penyuluhan atau sosialisasi seringkali tidak menjangkau langsung masyarakat yang membutuhkan, sehingga komunikasi efektif masih perlu ditingkatkan.

Dalam aspek membangun kepercayaan, kolaborasi yang dijalankan menunjukkan bahwa keterbukaan dan transparansi menjadi pondasi utama. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa pihaknya mengedepankan transparansi informasi, termasuk melalui pertemuan rutin dan laporan berkala. Hal ini didukung oleh Sekretaris Bappeda yang menyatakan pentingnya rapat koordinasi untuk berbagi informasi secara terbuka. Pegawai Bank Aceh, Abrar Maulida, menambahkan bahwa pihaknya selalu melaporkan penyaluran bantuan secara berkala dan memastikan dana sampai langsung ke penerima manfaat. Kepercayaan masyarakat pun meningkat, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Halimah dari Kecamatan Tanah Pasir yang merasa lebih yakin karena bantuan kini diterima melalui rekening, dengan kehadiran petugas dari dinas dan bank yang memberi penjelasan langsung. Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses penyaluran bantuan

sosial non-tunai, yang menunjukkan adanya kerja sama antara petugas dinas sosial, pihak bank, dan aparat desa dalam proses verifikasi dan pelaksanaan bantuan secara transparan.

Komitmen terhadap proses kolaborasi juga tampak kuat dari berbagai pihak. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa komitmen dibuktikan melalui penandatanganan kesepakatan dan pembuatan surat keputusan yang menegaskan tekad bersama. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyebut bahwa surat keputusan menjadi bentuk nyata dari komitmen institusi dalam kolaborasi ini. Tingkat kehadiran instansi dalam rapat juga menjadi indikator penting dalam menilai partisipasi aktif mereka. Sekretaris Bappeda menjelaskan bahwa komitmen dibangun melalui rapat koordinasi bersama tim penanggulangan kemiskinan dan rapat internal bidang perekonomian. Komitmen ini juga diperlihatkan oleh OPD lain seperti Dinas PUPR dan Baitul Mal yang secara aktif mengikuti rapat desk konvergensi program penanggulangan kemiskinan. Dari sektor swasta, Bank Aceh menunjukkan komitmennya melalui program bina lingkungan dan kerja sama penyaluran bantuan sosial non-tunai serta edukasi literasi keuangan bagi masyarakat miskin. Masyarakat, seperti yang disampaikan Ibu Halimah, merasakan langsung dampak dari komitmen ini karena bantuan kini diterima secara jelas, melalui sistem yang tertata dan transparan.

Secara keseluruhan, proses kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Aceh Utara mencerminkan adanya dialog yang aktif, kepercayaan yang dibangun melalui transparansi dan integritas, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara memiliki dinamika yang kompleks. Proses kolaboratif telah dijalankan melalui keterlibatan pemerintah daerah, lembaga swasta seperti Bank Aceh, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan program. Temuan ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Ramadhani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem memerlukan dukungan struktural seperti SK Bupati serta peran aktif dari lembaga keuangan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Sama halnya dengan di Kabupaten Rembang, di Aceh Utara, Bank Aceh memainkan peran penting melalui program CSR dan literasi keuangan.

Namun, berbeda dengan penelitian Handayani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance di Kabupaten Bangkalan tidak efektif akibat perbedaan persepsi antar aktor dan tidak adanya kesamaan standar mengenai kemiskinan, penelitian ini menemukan bahwa Aceh Utara telah memiliki kesepahaman awal yang cukup baik di antara aktor kolaborasi. Hal ini tampak dari adanya forum koordinasi yang terjadwal dan partisipasi aktif lintas sektor, meskipun masih terdapat kendala dalam hal ketimpangan sumber daya dan kurangnya komitmen berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil kajian Lawelai dan Nurmandi (2023), yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara aktor negara dan non-negara dalam penerapan model collaborative governance. Di Aceh Utara, keberhasilan proses dialog tatap muka dan keterbukaan dalam pelaksanaan bantuan sosial menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka merupakan fondasi penting dalam membangun

kepercayaan antar pihak. Dalam konteks ini, komitmen yang ditunjukkan melalui dokumen formal seperti SK Bupati dan partisipasi dalam rapat koordinasi mendukung keberlanjutan proses kolaboratif.

Sementara itu, berbeda dengan hasil penelitian Harianja dan Jamaruddin (2024) di Kabupaten Indragiri Hulu yang menekankan kelemahan dari sisi transparansi data dan rendahnya pengawasan masyarakat, penelitian ini justru menemukan bahwa transparansi telah menjadi nilai penting dalam proses penyaluran bantuan sosial di Aceh Utara. Bukti dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih percaya karena adanya laporan berkala dan kehadiran langsung petugas dinas dan pihak bank dalam proses penyaluran bantuan.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menguatkan pentingnya integrasi kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, serta proses kolaboratif yang inklusif dalam menerapkan *collaborative governance* untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan temuan Putri dan Baidhowah (2025) dalam penelitiannya di Kabupaten Sragen, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis desa (Desa Tumis) sangat bergantung pada sinergi aktor lokal dalam struktur kelembagaan yang jelas serta komitmen jangka panjang dari pemimpin lokal. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mempertahankan komitmen jangka panjang dan dalam menyeimbangkan distribusi sumber daya antar aktor. Perbedaan karakteristik lokal, budaya, dan kapasitas kelembagaan menjadi alasan utama yang menjelaskan adanya variasi hasil penerapan *collaborative governance* jika dibandingkan dengan lokasi penelitian sebelumnya.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara telah berjalan secara cukup efektif melalui desain kelembagaan yang inklusif, partisipatif, dan transparan. Pemerintah daerah, sektor swasta seperti Bank Aceh, serta masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Kolaborasi ini diperkuat oleh keberadaan regulasi formal seperti SK Bupati dan SOP lintas instansi, serta forum koordinasi rutin yang mendorong keselarasan visi dan pembagian peran yang jelas. Dialog tatap muka yang terjadwal, kehadiran kepemimpinan yang fasilitatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan literasi keuangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui kehadiran aktif lembaga dalam forum dan pelaksanaan program, serta tanggapan positif masyarakat terhadap transparansi dan efektivitas bantuan yang mereka terima.

Keterbatasan Penelitian. Pertama, cakupan penelitian hanya berfokus pada satu wilayah administratif, yaitu Kabupaten Aceh Utara, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial dan institusional yang berbeda. Kedua, penelitian ini mengandalkan data kualitatif melalui wawancara dan observasi, yang meskipun mendalam, tetap memiliki potensi bias subjektivitas.

Arah Masa depan Penelitian. penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah agar dapat dibandingkan lintas daerah, serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak langsung dari praktik kolaboratif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Selain itu, eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor penghambat keberlanjutan kolaborasi seperti perubahan politik lokal, ketimpangan sumber daya, dan resistensi

kelembagaan juga penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dalam pengembangan model *collaborative governance* di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Sekretaris Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Baitul Mal, serta pegawai Bank Aceh yang telah menjadi informan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada masyarakat miskin yang telah berkenan memberikan informasi dan pengalaman berharga. Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing dan civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas bimbingan dan dukungannya, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration*. Berkeley: University of California.
- Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health services research: Developing taxonomy, themes, and theory. *Health Services Research*, 42(4), 1758–1772. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x>
- Douglas, H. (2022). Data analysis techniques for qualitative study. In M. R. Islam, N. A. Khan, & R. Baikady (Eds.), *Principles of social research methodology* (pp. ...). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_30
- Handayani, N., Risianti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67.
- Harianja, R. P., & Jamaruddin, J. (2024). *Tata kelola kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2023). The model of collaborative governance in addressing poverty in Indonesia. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 2(2), 195–206. <https://doi.org/10.47134/rapik.v2i2.27>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putri, B. A. P. S., & Baidhowah, A. R. (2025). *Collaborative governance dalam penanganan kemiskinan melalui program Desa Tuntas Kemiskinan (Desa TUMIS) di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Ramadhani, N. P., Santoso, R. S., & Astuti, R. S. (2024). Collaborative governance dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 116–133.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.
- Sartika, I. (2018). Quo vadis “OK OCE”: Collaborative governance sebuah solusi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 54.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suroso, A. F., & Marzuki, M. (2024). *Collaborative governance dalam menangani pasca bencana tanah longsor di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Susha, I., & Gil-Garcia, J. R. (2019). A collaborative governance approach to partnerships addressing public problems with private data. In T. X. Bui (Ed.), *Proceedings of the 52nd Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS 2019* (pp. 2892–2901). IEEE.
- Velby, A. C., & Yuadi, I. (2023). Meta-analitik collaborative governance dalam pembangunan berkelanjutan. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 19–41.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456. <https://doi.org/10.1111/puar.12338>

